

BAB 2

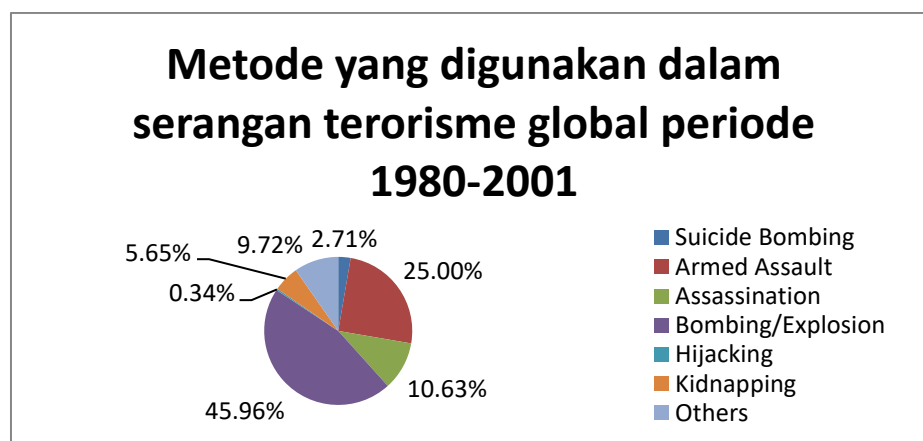
PEREMPUAN DAN PERLAWANAN

Secara umum bab II ini membahas mengenai sejarah keterlibatan perempuan dalam kelompok teroris dan fenomena pembom bunuh diri perempuan yang menjadi perkembangan selanjutnya dari kegiatan terorisme yang melibatkan perempuan. perempuan dan perlawanan di Indonesia. Selain itu pada bab II ini juga membahas mengenai perempuan dan perlawanan di Indonesia yang nantinya akan menjawab pertanyaan mengenai partisipasi perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia.

2.1 Sejarah dan perkembangan fenomena *female suicide terrorism* (FST) di dunia

Terorisme bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Teroris dalam melakukan misinya menggunakan berbagai bentuk atau cara untuk mencapai tujuannya. Beberapa bentuk serangan yang umum digunakan oleh para teroris antara lain pembunuhan, pengeboman, pembajakan, penculikan, dan bom bunuh diri (Reuveny & Thompson, 2010:11). Grafik 1.1 menunjukkan bentuk serangan yang digunakan teroris pada tahun 1980-2001. Bentuk serangan terorisme yang umum digunakan adalah pengeboman dengan presentase sebesar 45,96%. Sementara serangan terorisme bunuh diri terjadi sebanyak 3.796 serangan pada periode tersebut dengan presentase mendekati 3%.

Grafik 2.1



Sumber : Diolah dari *Global Terrorism Database, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START)* (www.start.umd.edu).

Terorisme bunuh diri (*suicide terrorism*) merupakan bentuk serangan taktis paling mematikan yang muncul pada awal 1980-an. Serangan terorisme bunuh diri telah terbukti menjadi salah satu taktik paling efisien dan mematikan yang digunakan oleh kelompok teroris selama dua puluh lima tahun terakhir (Pedahzur, 2006:22). Penggunaan serangan terorisme bunuh diri juga terbukti memiliki sepuluh sampai lima belas kali kekuatan destruktif dari serangan biasa yang telah menewaskan setidaknya 2.500 orang pada periode 1980-2001 (Hassan, 2008:274).

Tahun 1980 sampai 2001, serangan terorisme bunuh diri hanya menyumbang 3% dari insiden terorisme yang terjadi di dunia namun telah menyebabkan kematian sebanyak setengah dari total kematian akibat serangan terorisme (Zedalis, 2004:1). Sementara Robert Pape (2006:3) menyebutkan dari 315 serangan terorisme bunuh diri yang terjadi pada tahun 1980-2003 telah mengakibatkan kematian sebesar 48% dari total kematian yang disebabkan oleh serangan terorisme selama periode tersebut.

Penggunaan serangan terorisme bunuh diri mengalami peningkatan setelah peristiwa 9/11. Grafik 1.2 menunjukkan peningkatan serangan terorisme bunuh diri dari tahun 2001-2015 dimana peningkatan tajam terjadi di antara tahun 2004-2007. Terorisme bunuh diri sempat menurun yang cukup signifikan pada tahun 2008-2012 namun pada tahun 2013-2015 terjadi kenaikan kembali dalam serangan terorisme bunuh diri.

Grafik 2.2



Sumber: *Chicago Project on Security & Terrorism (CPOST) suicide attack database by female 2001-2015* (www.cpostdata.uchicago.edu).

Menurut Zedalis (2004:7) penggunaan bom bunuh diri oleh kelompok teroris dikarenakan bom bunuh diri merupakan senjata yang *low cost*, *low technology*, dan *low risk*. Serangan bom bunuh diri hanya memerlukan seorang atau beberapa pembom bunuh diri, cukup diberikan sedikit pelatihan mengenai bom bunuh diri, dan tidak akan meninggalkan jejak karena pelaku bom bunuh diri pasti akan mati. Oleh sebab itu tidak heran jika pada tahun 1981-2006 taktik ini telah diadopsi oleh 15 kelompok¹ teroris dan serangannya telah dilakukan di 29 negara² (Royston, 2011:15-17).

¹ Kelompok teroris yang telah menggunakan serangan bom bunuh diri antara lain: Al-Qaeda, Pemberontak Chechnya, Hezbollah, Hamas, Tamil Tigers (LTTE), Fatah, Al Aqsar Martyrs Brigade, Al Ansar Mujahidin, Syrian Socialist Nationalist Party, Kurdistan Workers Party (PKK), Revolutionary People's Party Front, TIKKO, Gama'a al-Islamiya, dan Egyptian Islamic Jihad.

² Daftar negara yang telah terkena serangan bom bunuh diri antara lain Irak, Israel, Sri Lanka, Pakistan, Libanon, Afganistan, Rusia, Turki, India, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Algeria, UK, AS, Cina, Kuwait, Kenya, Argentina, Maroko, Panama, Tanzania, Yaman, Tunisia, Qatar, Somalia, Jordan, Uzbekistan, dan Kroasia.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an yaitu era menuju terciptanya terorisme modern, beberapa kelompok teroris telah melibatkan perempuan di dalam kegiatannya (Ness, 2009:13). Vera Zasulich, dikenal sebagai pemimpin gerakan dan berpartisipasi dalam agresi di Rusia (Yasevi, 2014). Fusako Shigenobu, perempuan pendiri dan pemimpin Tentara Merah Jepang pada tahun 1971. Ulrike Meinhof, perempuan yang memiliki pengaruh besar bagi kelompok Baader Meinhof di Jerman Barat (Cunningham, 2010). Leila Khalid, perempuan dari kelompok Pembebasan Palestina (PFLP) menarik perhatian dunia terhadap perjuangan Palestina dengan beberapa kali terlibat dalam pembajakan pesawat (Ness, 2009:13).

Pada abad ke-21 keterlibatan kaum perempuan dalam kelompok dan aksi-aksi teroris terus meningkat dengan presentase 30% (Nacos, 2005). Kelompok teroris semakin lama semakin mengandalkan kaum perempuan di dalam menjalankan kegiatan terorisme. Cragin dan Daly dalam bukunya *Women as Terrorist: Mothers, Recruiters, and Martyrs* menyebutkan berbagai peran yang dilakukan perempuan dalam kelompok teroris. Perempuan memiliki peran sebagai perekrut, pengelola keuangan, propaganda, kurir, informan, dan mata-mata (Cragin & Daly, 2009). Perempuan pada umumnya memainkan peran sebagai pendukung atau sekedar pelengkap. Namun pada dua dekade terakhir, perempuan turut berperan dalam serangan terorisme bunuh diri dengan menjadikan tubuh mereka sebagai senjata yang mematikan (Hazef, 2005; Crenshaw, 2007; Bloom, 2011; Raghavan & Balasubramanian, 2014). Peran perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri memunculkan fenomena *female suicide terrorism* (FST).

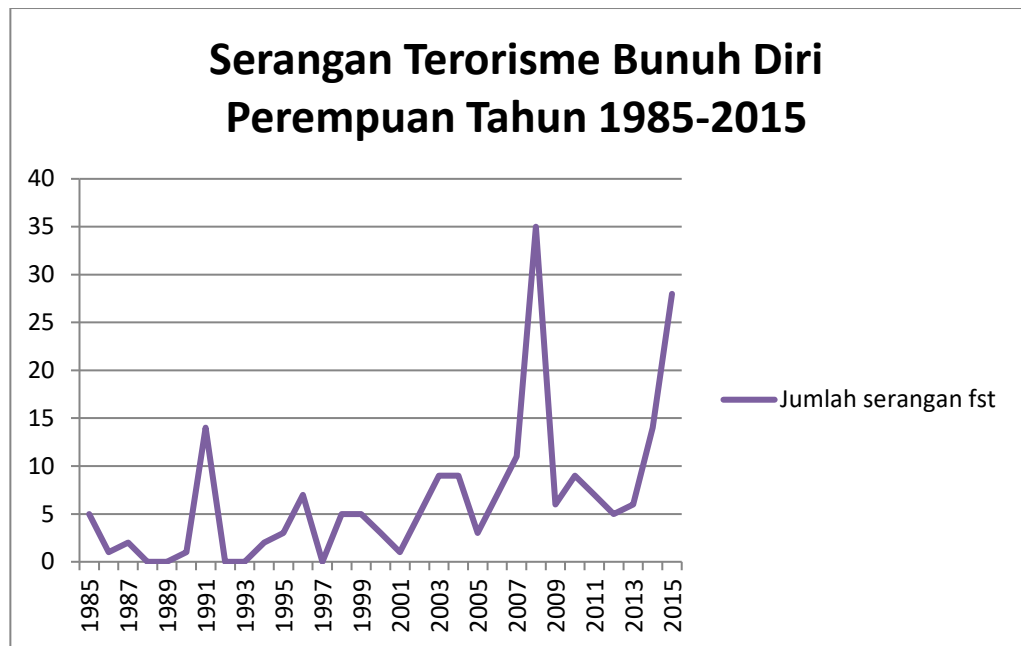
Fenomena *female suicide terrorism* (FST) yaitu penggunaan perempuan dalam serangan *suicide terrorism*. Fst pertama kali terjadi pada tahun 1985 oleh Partai Sosialis Suriah. Sana Mekhaidali atau yang dijuluki “Pengantin dari Selatan” merupakan perempuan pertama yang melakukan serangan FST dengan menargetkan sebuah konvoi Pasukan Pertahanan Israel di Lebanon Selatan dan berhasil menewaskan lima tentara Israel (Speckhard, 2015; Royston, 2011; O’rouke, 2009; Schweitzer, 2006; Zedalis, 2004). Serangan fst lain yang cukup

mengejutkan adalah serangan fst yang ditujukan untuk membunuh Rajiv Gandhi, mantan Perdana Menteri India pada tahun 1991 (Raghavan & Balasubramaniyan, 2014; Royston, 2011; Dearing, 2009). Thenmozhi Rajaratnam yang dikenal sebagai Dhanu, merupakan anggota Macan Tamil (LTTE) yang melakukan serangan fts dengan melewati kerumunan di Madras yang mengelilingi Rajiv Ghandi kemudian meledakkan dirinya sendiri dan berhasil menewakan target dan 11 orang lainnya (Santala, 2015; Raghavan & Balasubramaniyan, 2014).

Pada awalnya serangan FST hanya digunakan oleh kelompok teroris sekuler dengan presentase 85% (O'rouke, 2009). Namun pada tahun 2002, kelompok teroris keagamaan mulai menerapkan taktik FST. Wafa Idris merupakan pelaku pembom bunuh diri perempuan pertama yang diketahui terkait dengan organisasi teroris keagamaan (Beining & Evans, 2014). Wafa Idris melakukan serangannya di satu pusat perbelanjaan di kota Yerussalem pada 27 Januari 2002, menewakan satu orang laki-laki Israel dan 131 orang lainnya terluka (Viktor, 2005). Serangan tersebut diklaim oleh Hamas

Menurut Yoram Schweitzer (2006), antara tahun 1985 hingga 2006, perempuan melakukan serangan FST sebanyak 220 serangan atau 15% dari jumlah serangan st di dunia. Sementara menurut dataset yang dilakukan oleh Mia Bloom pada tahun 1985 – 2010, perempuan melakukan 257 serangan FST yang mewakili seperempat dari jumlah total serangan ST yang dilakukan oleh berbagai organisasi teroris di dunia (Bloom, 2011). Grafik 1.3 menunjukkan peningkatan serangan terorisme bunuh diri perempuan. Pada tahun 1980-an serangan terorisme bunuh diri perempuan hanya terdapat delapan serangan, lalu meningkat menjadi 37 serangan pada tahun 1990-an, dan pada tahun 2000-an meningkat menjadi 100 lebih serangan.

Grafik 2.3



Diolah dari: *Chicago Project on Security & Terrorism (CPOST) suicide attack database by female 1985-2015* (www.cpostdata.uchicago.edu).

Perempuan dinilai lebih efektif dan mematikan sebagai senjata dibandingkan dengan laki-laki. Keefektifan ini bisa dilihat dari jumlah korban yang diakibatkan dari sebuah serangan *suicide terrorism*. Menurut studi yang dilakukan *The Chicago Project on Security and Terrorism* menunjukkan, jumlah korban teroris perempuan mencapai 21 orang, sedangkan serangan yang dilakukan teroris laki-laki hanya menewaskan 13 orang. Sementara Linsey O’rourke dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan dapat membunuh rata-rata 8,4 orang per-serangan sementara laki-laki hanya membunuh 5,3 orang (O’rourke, 2009). Hal tersebut dikarenakan perempuan memiliki akses yang lebih mudah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan pada umumnya dikenal kurang berbahaya, sehingga cenderung mudah lulus dalam proses pemeriksaan keamanan (Reuter, 2011). Selain itu perempuan dapat menyembunyikan bahan peledak didalam pakaian mereka atau membawa bahan peledak dengan cara pura-pura hamil (Bloom, 2007).

Perempuan telah melakukan serangan FST di berbagai negara. Sejak tahun 1980an hingga 2015 perempuan telah menjadi pelaku serangan FST di Afghanistan, India, Irak, Israel, Lebanon, Pakistan, Rusia, Somalia, Sri Lanka, Turki, dan Uzbekistan (O'rourke, 2009). Jessica Davis (2013) menyebutkan bahwa serangan *female suicide terrorism* (FST) di Irak mencapai sekitar 25% dari seluruh serangan *suicide terrorism* (ST) yang terjadi disana, sekitar 24% dari seluruh serangan st di Palestina dilakukan oleh perempuan, kelompok Chechnya telah melakukan serangan FST sekitar 20%, LTEE di Sri Lanka 14% dan PKK sekitar 8%. Beberapa kelompok teroris yang telah merekrut perempuan untuk melakukan serangan FST antara lain *Syrian Socialist Nationalist Party* (SSNP), *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE), *Kurdistan Workers Party* (PKK), Pemberontak Chechnya, *al-Aqsa Martyrs Brigade*, *Palestian Islamic Jihad* (PIJ), Hamas, dan AQI (Beining & Evans, 2014).

2.2 Perempuan dan Perlawanan di Indonesia

Dari sejarah dan perkembangan keterlibatan perempuan dalam terorisme di dunia menunjukkan bahwa pada abad ke-20 perempuan mulai menunjukkan peran yang lebih aktif dalam kegiatan terorisme. Dibalik serangan terorisme yang dilakukan oleh para pria ternyata juga terdapat partisipasi dari perempuan dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurut riset yang dilakukan oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) yang berjudul *Mother to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists* menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam gerakan teror di Indonesia bukanlah hal yang baru. Perempuan telah terlibat, namun peran mereka semata-mata sebagai pendukung (IPAC, 2017).

Melihat kenyataan tersebut, pada sub bab ini akan dibahas mengenai perempuan dan perlawanan di Indonesia. Sub bab ini nantinya akan menjawab pertanyaan mengenai partisipasi perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah partisipasi perempuan dalam radikalisme di Indonesia merupakan kontinuitas dari perjalanan sebuah perjuangan perempuan dalam membentuk kepribadiannya untuk menjadi seorang teroris atau merupakan

fenomena *rupture* yaitu retakan dari sejarah perjuangan perempuan di masa lalu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pemetaan mengenai perlawanan perempuan di Indonesia. Pemetaan dilakukan dengan pembagian empat periode waktu yaitu: (1) periode pra-kemerdekaan; (2) periode awal kemerdekaan dan orde lama; (3) periode orde baru; dan (4) periode reformasi dan pasca reformasi.

2.2.1 Periode Pra-Kemerdekaan

Perjuangan perempuan pada periode ini dilatarbelakangi oleh semangat pembebasan dan perlawanan terhadap penjajah. Pada periode ini perjuangan perempuan dibagi lagi menjadi tiga periode, yaitu: (1) periode perempuan mengangkat senjata; (2) perempuan mendidik; dan (3) periode perempuan berpolitik dan berorganisasi.

2.2.1.1 Periode Perjuangan Perempuan dalam Peperangan (1825-1900)

Kekuasaan Belanda pada pertengahan abad ke-18 semakin meluas, sementara kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara nampak semakin merosot keberadaannya karena ketidakberdayaan mereka untuk melawan kekuatan asing. Perlakuan Belanda yang sewenang-wenang terhadap tanah rakyat dan penderitaan rakyat dibawah tekanan ekonomi yang sulit, kemudian memunculkan tokoh-tokoh pejuang pemberontakan untuk melawan kolonial Belanda (Kayatun, 1995). Sejumlah nama perempuan di beberapa daerah muncul pada periode ini. Bersama kaum laki-laki, mereka turut mengangkat senjata mengusir penjajah. Perempuan yang terlibat dalam mengusir penjajah antara lain Nyi Ageng Serang (1752-1828) yang berjuang di tanah Jawa, Martha Kristina Tiahahu (1800-1818) di Maluku, Cut Nyak Dien (1850-1908), dan Cut Mutia (1870-1910) di Aceh (Yasir, 2015).

Pejuang perempuan dalam melawan kolonial Belanda di tanah Jawa salah satunya adalah Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang merupakan seorang anak perempuan dari Panembahan Notroprojo yaitu seorang adipati di Serang. Nyi Ageng Serang turut serta berjuang dalam melawan kolonial Belanda karena ketidakrelaannya menyaksikan rakyat yang semakin tertekan. Selain itu gugurnya

kakak yang sangat dicintainya dalam pertempuran melawan Belanda di Serang, kematian ayah dan bundanya, serta kematian suami di tangan Belanda membuat semakin membara tekad dan keberaniannya untuk berjuang melawan penjajah (Kayatun, 1995).

Perjuangan Nyi Ageng Serang dalam melawan penjajah salah satunya adalah dengan terlibat dalam Perang Diponegoro. Peran Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda cukup besar diantaranya sebagai ahli *Strateeg* atau seorang taktikus dalam perang. Nyi Ageng Serang adalah seorang *strateeg* yang ulung dengan menggunakan siasat ‘kamufalse daun lumbu³’ dan siasat ‘benteng pendem⁴’.

Gambar 2.1
Nyi Ageng Serang



Sumber: (Merdeka.com, 2012)

³Kamufalse daun lumbu adalah pemikiran Nyi Ageng Serang dimana setiap prajuritnya diwajibkan membawa daun lumbu yang dipergunakan sebagai kerudung sehingga dari kejauhan nampak seperti kebun keladi. Bila sudah dekat dan jarak sasaran maka musuh akan diserang dan dihancurkan (Sudarmanto, 1992).

⁴Taktik benteng pendem merupakan taktik perang gerilya (Kayatun, 1995).

Nyi Ageng Serang juga berperan sebagai komandan lapangan di sektor utara yang bertugas untuk menguasai daerah-daerah di sektor utara⁵. Sementara di sektor selatan⁶ Nyi Ageng Serang berperan dalam mengobarkan semangat Perjuangan Diponegoro (Putu,1985).

Sementara di wilayah barat Indonesia terdapat dua tokoh perempuan yang turut serta berjuang melawan penjajah Belanda. Mereka adalah Cut Nyak Dien dan Cut Meutia. Cut Nyak Dien merupakan seorang putri *uleebalang*⁷ keturunan langsung dari Sultan Aceh yang berdarah pahlawan. Menurut Hazil (1952), Cut Nyak Dien berjuang melawan penjajah dikarenakan kekecewaan dan kesedihan yang dialami akibat meninggalnya suaminya pada perang Aceh dalam melawan Belanda. Selain itu darah kepahlawanan yang mengalir dari keluarganya merupakan dasar yang kuat bagi perjuangan Cut Nyak Dien untuk melawan penjajah. Perjuangan Cut Nyak Dien dalam melawan Belanda di Aceh dimulai tahun 1896 sampai 1908 (Amila, 2016).

Gambar 2.2
Cut Nyak Dien dan Cut Meutia



Sumber: (Suaramuslim.net, 2017; Tirto.id, 2018).

⁵ Daerah-daerah di sektor utara yaitu Serang, Gambringan, Purwodadi, Grobogan, Jakenan, Juana, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.

⁶ Daerah-daerah di sektor selatan yaitu Magelang, Salatiga, Boyolali, Sragen, Klaten, dan Prambanan.

⁷ Uleebalang berarti bangsawanto

Cut Nyak Dien bersama dengan Teuku Umar membangun kekuatan untuk melawan Belanda. Namun pada Februari 1899, Teuku Umar gugur ketika berjuang melawan Belanda. Peran Cut Nyak Dien dalam perjuangan melawan Belanda adalah sebagai penggerak pasukan, pengatur strategi, dan pemimpin di garis depan dalam perang melawan Belanda (Hartono, 1997).

Tokoh perempuan lainnya yang berasal dari Aceh adalah Cut Meutia. Cut Meutia merupakan putri dari Teuku Ben Daud, seorang *uleebalang* di desa Pirak. Pada tahun 1901, Cut Meutia bersama dengan suaminya Teuku Chik Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Teuku Chik Di Tunong memulai perjuangan melawan Belanda di daerah Pasai (Fathurohman, 2014). Peran Cut Meutia dalam perjuangan melawan Belanda adalah sebagai pengatur strategi pertempuran. Pada bulan Maret 1905, Teuku Chik Di Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lhoksumawe. Setelah suaminya meninggal, Cut Meutia melanjutkan perjuangan melawan Belanda bersama Pang Nanggroe⁸. Namun, September 1901, Pang Nanggroe meninggal dunia akibat terkena tembakan oleh pasukan Belanda. Sehingga Cut Meutia mengambil alih kepemimpinan pasukan untuk berjuang melawan Belanda di Aceh (Indrajaja, 1999).

Perempuan-perempuan yang terlibat dalam pertempuran melawan Belanda tersebut dikenal dengan Angkatan Srikandi⁹. Ketiga Srikandi tersebut berasal dari kelompok elit bangsawan yang memiliki potensi ketokohan dan jiwa juang yang tinggi dibandingkan dengan perempuan pada zamannya. Pada awalnya, para Srikandi tersebut bersama-sama dengan suami mereka berperang melawan Belanda. Selanjutnya mereka mengambil alih kepemimpinan dari suami mereka untuk melawan Belanda setelah suami mereka dibunuh (Komandoko, 2010).

⁸Pang Naggroe merupakan sahabat perjuangan Teuku Chik Di Tunong yang menjadi suami Cut Meutia setelah Teuku Chik Di Tinong wafat sesuai dengan wasiat yang diamanahkan kepadanya sebelum beliau dihukum mati.

⁹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Srikandi adalah nama salah seorang istri Arjuna yang sangat berani dan pandai memanah. Di Indonesia Srikandi dipakai sebagai gelar para pahlawan perempuan yang memiliki keberanian untuk melawan penjajah.

2.2.1.2 Periode Reformasi Pendidikan Awal (1900-1908)

Pada periode reformasi pendidikan awal diawali dengan diberlakukannya politik etis pada tahun 1901 di Indonesia. Politik etis merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memajukan penduduk di wilayah jajahan sebagai wujud balas budi atas keuntungan yang sudah didapatkannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberi peluang kepada penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kolonial dengan politik etisnya, terutama melalui institusi pendidikan modern telah menciptakan masyarakat baru yang akrab dengan modernitas, masyarakat kelas menengah di perkotaan kemudian tampil dengan tema-tema baru yang mengekspresikan hasrat kemajuan. Perubahan mendasar terjadi hampir di semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk perubahan sosial politik dan keagamaan, serta gerakan kaum perempuan (Burhanudin & Fathurahman, 2004).

Meskipun jumlah kaum perempuan yang beruntung memperoleh pendidikan tidak begitu banyak, namun usaha mereka untuk memajukan perempuan lainnya merupakan upaya yang cukup tepat. Perempuan-perempuan yang bergerak memajukan kaum perempuan khususnya di bidang pendidikan adalah R.A Kartini di Jawa Tengah, Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus di Minangkabau, Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara, Ny. Hj. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan Ny. Hj. Rasuna Said di Sumatera Barat.

Tokoh gerakan perempuan pada periode ini adalah Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah dan Dewi Sartika (1884-1947) di Jawa Barat. Pada periode angkatan Kartini merupakan awal dari perjuangan perempuan yang dipengaruhi oleh gerakan perempuan di Barat. Ide-ide emansipasi perempuan yang diperjuangkan perempuan di Eropa dengan model feminisme liberal yang menekankan pada akses dan partisipasi perempuan yang sama dengan laki-laki di wilayah publik, peran produktif dan isu-isu perempuan tentang pendidikan, perlindungan hukum, dan budaya (Mufidah, 2014).

Kartini dan Dewi Sartika merupakan perempuan yang berasal dari kelompok elit bangsawan yang mengusung pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kartini dilahirkan pada 21 April 1879 dan merupakan putri dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Sementara Dewi Sartika dilahirkan pada 4 Desember 1884 dalam kalangan bangsawan Sunda, sebagai putri dari Raden Rangga Somanagara, Patih Bandung (Lubis, 2006).

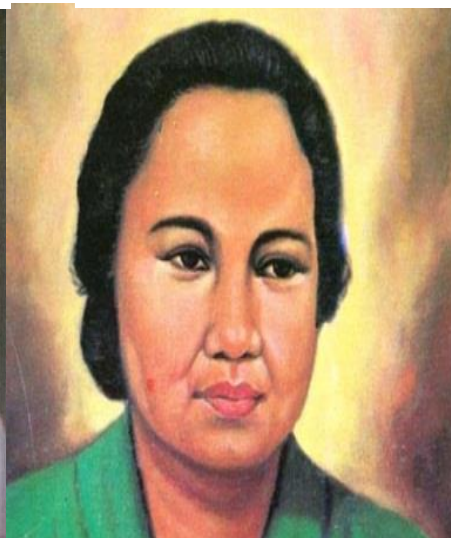
Kartini dan Dewi Sartika berpendapat ketertinggalan perempuan dan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan dapat diubah melalui pemberian kesempatan bagi perempuan dalam bidang pendidikan. Pada periode ini perjuangan perempuan dihadapkan dengan dua kekuatan besar yaitu perjuangan untuk melawan penjajah sekaligus melawan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dominasi tersebut berakar pada budaya patriarki dan pemahaman agama yang merugikan perempuan terutama dalam konteks lembaga perkawinan. Oleh sebab itu, semakin tinggi pendidikan perempuan akan semakin tinggi posisi tawar dihadapan laki-laki.

Gambar 2.3
Kartini



Sumber : (Kompas.com, 2015)

Gambar 2.4
Dewi Sartika



Sumber : (Nu.or.id, 2013)

Pada dasarnya, kaum perempuan pada periode ini tidaklah berjuang sendirian. Dalam usaha memperjuangkan emansipasi perempuan, Kartini didukung ayah dan suaminya, Dewi Sartika juga dibantu suaminya, dan Achmad Djajadiningrat yaitu salah satu tokoh yang membantu kaum perempuan dalam memerangi pernikahan dini. Melalui beberapa tokoh lelaki tersebut dapat dilihat adanya peran lelaki dalam memperjuangkan dan akhirnya mewujudkan emansipasi perempuan di Indonesia (Steurs, 2008:83).

2.2.1.3 Periode Berkembangnya Organisasi Perempuan (1908-1944)

Pendidikan yang dikenyam pada masa kolonial melahirkan banyak perubahan pada diri kaum perempuan, diantaranya kesadaran untuk berorganisasi. Hal tersebut dilakukan demi keinginan terbebas dari belenggu penjajah, dan upaya menyelesaikan masalah sosial seperti pelacuran, permaduan, perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan dan anak-anak. Organisasi perempuan yang pertama kali muncul di Indoneisa adalah Poetri Mardika pada tahun 1912. Organisasi ini kemudian diikuti oleh kelahiran organisasi perempuan lainnya seperti Poetri Sedjati, Wanita Oetama, Jong Java Meisjeskering, dan yang lainnya.

Setelah tahun 1920, berdiri organisasi perempuan yang berbasis agama, diantaranya Aisiyyah, Muslimat NU, dan Poesara Wanita Katholik. Kemudian pad tahun 1928 di Yogyakarta diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres tersebut dihadiri lebih dari 30 organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Pokok-pokok yang dibahas dalam kongres tersebut adalah masalah pendidikan, reformasi perkawinan, koedukasi, dan poligami. Pada kongres tersebut juga dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang setahun kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpoean Perempuan Indonesia (PPPI).

Satu-satunya organisasi yang mengecam politik kolonial Belanda dan anti-kapitalisme adalah Isteri Sedar. Organisasi ini berdiri tahun 1930, dan tidak bergabung dengan Kongres Perempuan Indonesia karena adanya perbedaan pandangan, terutama mengenai poligami. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, pergerakan perempuan telah terorganisir dalam sebuah wadah, baik menjadi bagian

dari organisasi yang dominan laki-laki maupun secara individu masuk dalam organisasi atau lembaga dimana perempuan telah menjadi bagian dari pengambil keputusan maupun berperan sebagai pemegang kepemimpinan dalam kelompok nasionalis Islam.

2.2.2 Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1965)

Peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat hingga pada revolusi fisik (1945-1950), terlihat gerak perempuan Indonesia sangat progresif dalam upaya pendirian negara Indonesia. Banyak muncul dan berkembang organisasi-organisasi perempuan di Indonesia serta peran aktif perempuan dalam wilayah politik.

Peranan perempuan dalam periode Orde Lama, dapat ditelusuri melalui keterwakilannya dalam lembaga pemerintahan, kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan, serta perkembangan perempuan dalam masyarakat. Dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, Indonesia sedang berusaha memperoleh pengakuan atas kemerdekaannya ditengah upaya Belanda untuk kembali ingin menjajah Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, organisasi perempuan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) sebagai salah satu organisasi perempuan yang ada saat itu memberi dukungan penuh atas kemerdekaan Indonesia (Wieringa, 2010:151). KOWANI juga berperan serta menjadi anggota organisasi internasional WIDF (Women's International Democratic Federation) pada tahun 1946. Bergabungnya KOWANI dalam organisasi WIDF bertujuan agar WIDF dan dunia internasional membantu menyampaikan protes terhadap agresi Belanda ke Indonesia di PBB (Wieringa, 2010. 152).

Pada orde lama, kelompok-kelompok radikal menyebarkan teror dalam berbagai bentuk pemberontakan, penyebaran ideologi-ideologi radikal, dan aksi gerakan separatis yang bertujuan untuk memecah kedaulatan NKRI dengan menggulingkan pemerintahan yang pada saat itu baru saja terbentuk. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan yang fluktuatif antara umat Islam dengan Negara pasca kemerdekaan dalam bentuk penindasan politik Islam, serta sebagai bentuk

respon dari kelompok kelas untuk melawan dominasi modal yang bersifat oligarkis (Umar, 2010). Contohnya, pada rezim Orde Lama muncul organisasi atau gerakan yang menentang pemerintah seperti PRRI/Permesta, PKI, dan pada tahun 1950-an, muncullah gerakan radikal yang menonjol pada zamannya yaitu gerakan DI/TII yang nantinya akan berkembang menjadi induk dari gerakan JI (Bakti, 2014:10).

Keterlibatan perempuan dalam kelompok radikal di Indonesia dimulai pada periode ini. Munculnya gerakan Darul Islam (DI) dan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949. Gerakan ini memiliki misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara. Darul Islam didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang terlahir pada 7 Januari 1907 di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kartosuwirjo memproklamkan diri sebagai imam atau pemimpin negara baru yang disebut Darul Islam pada Mei 1948. DI merupakan gerakan separatis pertama di Indonesia. Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda menjadi salah satu penyebab berdirinya DI. Menurut Kartosuwirjo, dengan disepakatinya perjanjian Renville maka Republik Indonesia sudah bubar, sehingga ia merasa punya hak untuk mendirikan negara baru, yaitu Negara Islam Indonesia (NII). NII diproklamkan pada 7 Agustus 1949 di Cisampak, Kecamatan Cilugar, Kabupaten Tasikmalaya. Isi dari proklamasinya yaitu, *“Kami umat Islam Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam.”*

Dewi Siti Kalsum merupakan istri Kartosoewirjo. Dewi merupakan putri dari Ajengan Ardiwisastra, seorang kiai sekaligus nigrat kaya di Malabong. Menurut Kartosoewirjo, Dewi memiliki semacam pertalian darah dengan dia yaitu sama-sama keturunan Arya Penangsang. Dewi turut bergerilya mendampingi Kartosoewirjo, namun dia tidak mampu menjelaskan alasan mengapa dia bersedia bersusah payah selama 13 tahun keluar masuk hutan bersama suaminya. Menurut penuturan Dewi sebagai istri orang pergerakan, Dewi selalu berpindah-pindah ikut suami.

Peristiwa politik pada 1 Oktober 1965, merubah tatanan kehidupan masyarakat dikarenakan adanya politik adu domba, dengan melakukan penuduhan pembunuhan dan perbuatan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh kelompok politik dari golongan angkatan kepada golongan politik kiri, yang memiliki tujuan untuk menguasai kursi pemerintahan dengan melakukan propaganda dan kampanye fitnah kepada golongan PKI dan organisasi sosial dan organisasi perempuan yang memiliki paham yang sama, seperti organisasi perempuan Gerwani yang juga turut ikut terkena dampaknya.

2.2.3 Masa Orde Baru (1965-1998)

Pada periode ini dibawah kekuasaan presiden Soeharto, semua organisasi perempuan di kontrol oleh pemerintah. Dalam hal ini sering di katakan sebagai masa penghancuran gerakan perempuan dimana aktivitas semua organisasi perempuan dibatasi. Mereka hanya boleh menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pengajian.

Karakter organisasi perempuan di periode orde baru dapat dilihat dalam bidang ideologi bahwa perempuan adalah sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak, dan Pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumah tangga. Mereka hanya sebagai pekerja yang menambah penghasilan keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Tidak berjuang untuk hak-hak kaum perempuan, berbicara mengenai penindasan berarti mempertanyakan politik pemerintah dan hal tersebut adalah perbuatan yang tabu. Kegiatan-kegiatan utamanya seperti membuat karangan bunga, masak-memasak, mengikuti penataran-penataran indoktrinasi ideologi negara. Organisasi perempuan juga memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dukungan untuk partai tertentu dalam pemilihan umum.

Wadah yang disediakan oleh pemerintah adalah PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) atau Dharma Wanita yang bersifat terikat pada pemerintah. Jadi organisasi ini tidak diijinkan untuk bergerak bebas sebagaimana organisasi perempuan sebelumnya. Dan yang menjadi bagian keanggotaan dari

organisasi di bawah pemerintahan adalah para istri-istri pegawai pemerintah yang mendukung keberhasilan pembangunan pada periode orde baru.

Hubungan pemerintah dan kelompok-kelompok Islam pada periode orde baru dapat dikatakan harmonis, khususnya dalam hal memberantas komunisme, namun tidak menjadi sebuah jaminan dalam hal pencegahan berkembangnya aksi-aksi terorisme dari kelompok atau gerakan Islam radikal. Disahkannya UU Subversi, serta adanya kebijakan-kebijakan otoriter pada rezim orde baru yang sangat mengekang hak asasi rakyat, membuat gerakan atau kelompok radikal yang berpotensi untuk melakukan tindakan terorisme semakin berkembang, sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah rezim orde baru ini (Mbai, 2014:131).

Beberapa contoh serangan teror yang terjadi di rezim ini adalah: (1) Aksi peledakan tempat ibadah pada tahun 1976 oleh kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya Komando Jihad (2) Aksi teror oleh kelompok Hassan Tiro yang menamakan dirinya sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia yang berlangsung dari tahun 1977. (3) Gerakan kelompok Pola Perjuangan Revolusioner Islam pimpinan Abdul Qadir Jaelani pada tahun 1978. (4) Teror yang dilakukan oleh kelompok warman yang berasal dari Komando Jihad yang berlangsung tahun 1978, 1979, dan 1980. (5) Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Imran, yang menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusioner Islam Indonesia yang berlangsung dari tahun 1980-1981 (Mubarak, 2008: 66-67). (6) Aksi pembajakan pesawat Garuda Indonesia 206 pada tanggal 28 Maret 1981 oleh kelompok Komando Jihad pimpinan Imran bin Muhammad Zein. (7) Aksi pemboman Candi Borobudur oleh Abdulkadir bin Ali Alhabsy dan Husein bin Ali Alhabsy pada tanggal 21 Januari 1985 (tempo.co.id).

2.2.4 Masa Reformasi dan Pasca Reformasi (1998-sekarang)

Perubahan sistem politik secara besar-besaran yang terjadi di era reformasi yang berlangsung semenjak tahun 1998, kemudian menghadirkan sistem pemerintahan yang demokratis dan pro rakyat dengan ditegakkannya nilai-nilai

HAM yang menjamin kebebasan rakyat dalam kehidupan sehari-hari, adanya kebebasan berpolitik, serta transparansi dalam sistem politik negara.

Pada periode reformasi banyak organisasi perempuan yang mulai berdiri. Hal ini disebabkan karena pada masa reformasi terjadi banyak perubahan seperti kebebasan berekspresi yang tetap di bawah naungan hukum negara namun sangat jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Gerakan perubahan yang lebih baik dalam segala bidang dan untuk semua kalangan, baik dalam hal sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dengan tidak memandang kalangan. Hal inilah yang melatarbelakangi banyaknya organisasi perempuan yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.

Organisasi perempuan yang muncul pada era reformasi salah satunya adalah organisasi Perempuan Mahardhika yang berdiri tahun 2003 dan berpusat di Jakarta. Organisasi ini selama 13 tahun telah membentuk cabang di 9 kota dan 7 provinsi. Namun pada periode pasca reformasi Indonesia selain memunculkan berbagai organisasi perempuan, perempuan juga mulai kembali terlibat aktif dalam kelompok-kelompok fundamentalisme, radikalisme, bahkan terorisme. Selain itu, reformasi mendorong berkembangnya organisasi perempuan dengan munculnya organisasi PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga), Yayasan Pulih, Migran Care, Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL). Sementara organisasi perempuan berbasis keagamaan pun tumbuh seperti Rahima, Fahmina, organisasi perempuan Kajian Islam dan Sosial (LKIS).

Menurut Tyas Retno, periode reformasi disebut sebagai masa redefinisi perempuan yang sempat didefinisikan secara luas oleh masa pra kemerdekaan sampai masa kemerdekaan khususnya Orde Lama. Definisi yang dibangun ketika masa kemerdekaan sampai masa Orde Lama menempatkan setiap manusia memiliki kewajiban dan hak untuk membangun bangsa dan negara berupaya merebut kemerdekaan dan mengisinya demi kemakmuran bersama. Oleh karenanya, tidak aneh apabila terdapat organisasi perempuan yang memperjuangkan nasib buruh, tani, anak, perempuan, politik, pemerintahan, dan

lain sebagainya. Definisi ini mengalami penyempitan pada masa Orde Baru dengan menghilangkan peran perempuan dalam peran negara dan pemerintahan ke dalam peran rumah tangga. Kemudian definisi awal tentang perempuan dihadirkan kembali pada masa reformasi yang ditandai dengan munculnya organisasi perempuan.

Bisa dikatakan era kebebasan tersebut merupakan awal mula kebangkitan demokrasi bangsa Indonesia. Tetapi di sisi lain, era reformasi merupakan awal dari berkembangnya sel-sel teroris di Indonesia. Pada era ini, paham-paham radikal kembali masuk, menyebar, dan berkembang di Indonesia, dengan memanfaatkan ketidakstabilan kondisi politik pasca runtuhnya orde baru. Longgarnya pengawasan pemerintah dan kebijakan politik merupakan keuntungan bagi sel-sel radikal teroris untuk membangun dan mengukuhkan kekuatan di wilayah NKRI.

Pada periode pasca reformasi yang merupakan masa transisi, situasi sosial-politik berada di pusaran yang labil, dimana aturan politik tidak menentu. Sehingga pada periode dapat dikatakan sebagai bangkitnya gerakan radikal Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi Islam yang termajinalisasikan dan sekaligus untuk menegaskan identitas kultural dan politik mereka. Di tengah-tengah tidak adanya aturan main politik yang jelas di periode transisi ini, kemudian memunculkan berbagai kelompok-kelompok Islam radikal (Zuhari, 2007). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut antara lain Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Persiapan Penegakan Syariat (KPPSI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lainnya (Mufid, 2010).

Munculnya gerakan-gerakan sosial yang dimotori oleh perempuan pada masa pra kemerdekaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada problem yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Tidak munculnya problem keberadaan perempuan diluar kodratnya menunjukkan bahwa sistem patriarkhi hilang dan larut dalam kepentingan yang lebih besar yakni gerakan saling mendukung demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Peran perempuan yang saling bahu membahu dengan laki-

laki dalam merebut kemerdekaan telah banyak dikaji oleh para peneliti. Hampir semua sepakat bahwa peran perempuan sama besarnya dengan peran laki-laki dalam peperangan mengusir penjajah, pendidikan, dan dalam berorganisasi sehingga mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran perempuan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa perempuan telah membuat batu pijakan yang sangat kuat dalam rangka turun serta dalam merebut kemerdekaan dan membangun bangsa.

Dari uraian mengenai perempuan dan perlawanan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia merupakan sebuah fenomena *rupture* yaitu retakan dari sejarah perjuangan perempuan di masa lalu. Dalam sejarah perempuan Indonesia, perempuan berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Partisipasi perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia bukan fenomena kontinuitas dari perjalanan perjuangan perempuan di masa lalu dalam membentuk kepribadiannya sebagai teroris.

